

## BAB IV

### ANALISIS & PEMBAHASAN

#### 4.1 Pelaksanaan Pinjaman Daerah

Seiring dengan peningkatan kebutuhan daerah akan dana untuk pembiayaan pembangunan, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman sebagai alternatif sumber pembiayaan untuk menutup kekurangan dana bagi pembangunan daerah tersebut. Dana pinjaman dapat bersumber dari luar negeri yang diteruskan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui SLA, maupun dari dalam negeri melalui RPD, serta pinjaman komersial dari bank pemerintah atau bank swasta.

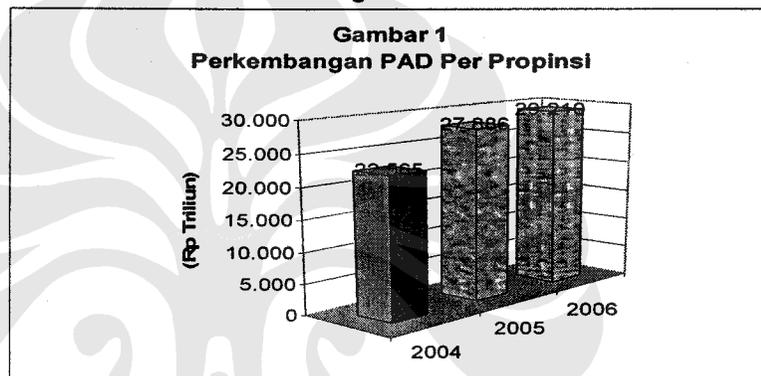
Dalam pemberian pinjaman, yang menjadi dasar penilaian kelayakan adalah kemampuan daerah untuk mengembalikan pinjaman beserta bunganya pada saat jatuh tempo. Namun demikian, pada kenyataannya, kemampuan daerah untuk meminjam berbeda-beda sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Daerah yang mempunyai PAD relatif besar akan memiliki kemampuan meminjam yang besar pula.

Sehubungan penelitian peta penerbitan sukuk oleh pemerintah propinsi maka untuk melihat lebih jauh tentang kemungkinan penerbitan sukuk tersebut, pada bagian ini akan diuraikan tentang analisis kinerja keuangan daerah propinsi dengan PAD sebagai fokus ukuran kinerja dengan menggunakan analisis elastisitas, analisis *share*, analisis *growth* selanjutnya hal lain yang digunakan sebagai tolok ukur penilaian dari sisi penawaran, analisis atas kemampuan pinjaman daerah merujuk pada PP 54 tahun 2005. Sedangkan dari sisi permintaan akan dianalisis permintaan sukuk dengan menggunakan parameter jumlah penduduk muslim, komposisi keluarga sejahtera dan komposisi penghimpunan dana likuid di masing – masing daerah. Disamping itu untuk semakin memberikan gambaran akan potensi penerbitan sukuk akan dilakukan analisis lebih lanjut untuk daerah terpilih. Sedangkan data yang digunakan adalah tahun 2005 dan tahun 2006 sebagai alat analisis.

## 4.2. Kondisi Umum Keuangan Propinsi

Setelah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diberlakukan pada tingkat provinsi, terjadi perkembangan PAD yang menggembirakan. PAD di provinsi seluruh Indonesia mengalami peningkatan dari Rp 22,6 triliun pada tahun 2004, menjadi Rp 27,8 triliun pada tahun 2005 dan Rp 29,2 triliun pada tahun 2006. Gambar 4.1 berikut menunjukkan perkembangan PAD dari tahun 2004 s.d. 2006.

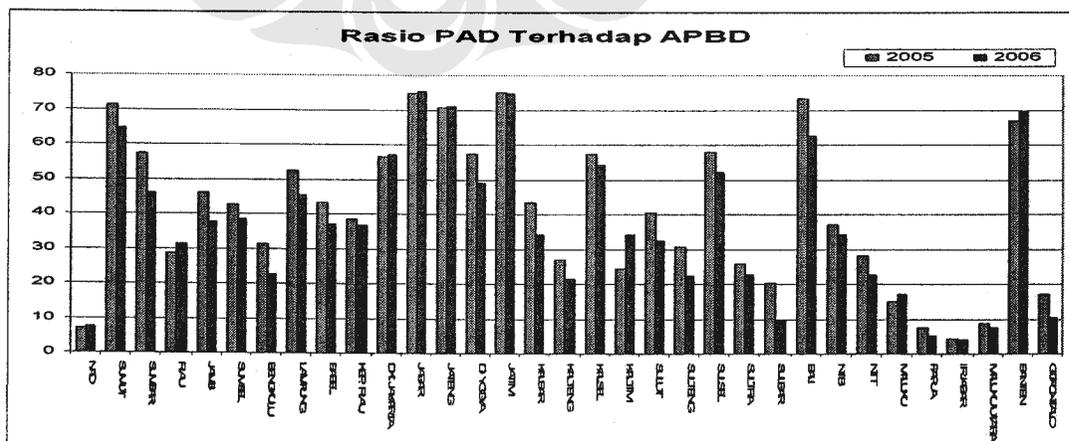
**Gambar 4.1**  
**Perkembangan PAD Provinsi**



Sumber : Diolah dari Data DJPK Depkeu tahun 2004, 2005, dan 2006

Kalau dilihat dari peran PAD dalam membiayai APBD, maka besaran PAD tahun 2005 tersebut merupakan 49% dari APBD; dan PAD tahun 2006 merupakan 48% dari APBD. Lihat Gambar 4.2 perkembangan PAD per propinsi.

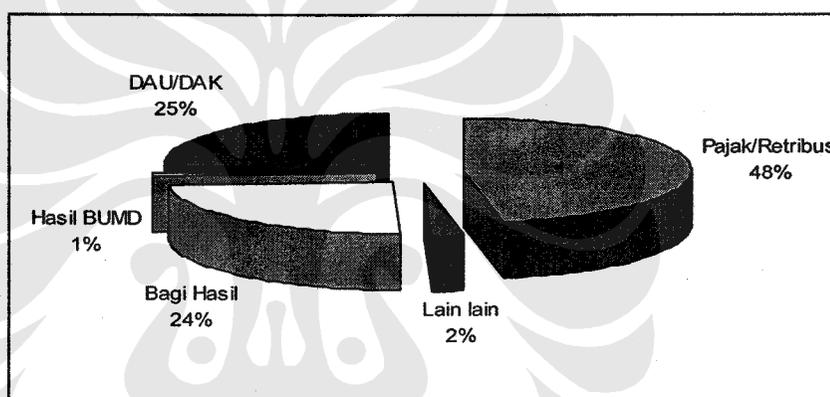
**Gambar 4.2**  
**Perkembangan PAD Provinsi 2005 - 2006**



Sumber : Diolah dari Data DJPK Depkeu tahun 2005 dan 2006

Secara rinci komposisi penerimaan daerah provinsi pada tahun 2006 adalah sebagai berikut: Dana Perimbangan sebesar 54 %, PAD sebesar 32 %, Lain-lain yang sah sebesar 1 %, dan anggaran tahun yang lalu sebesar 13 %. Pada Tahun 2002 dapat dilihat bahwa Dana Perimbangan menduduki peran terbesar didalam struktur pendapatan APBD Provinsi (54 %) disusul peran dari PAD (32 %). Di sisi lain anggaran tahun lalu yang masih dikategorikan penerimaan mencapai 13 %. Gambar 4.3 menunjukkan komposisi penerimaan pada APBD 2006.

**Gambar 4.3**  
**Komposisi Penerimaan pada APBD 2006**



Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan, Depkeu, 2006

Dari sisi belanja (pengeluaran), belanja aparatur dalam APBD Provinsi mengambil porsi 32 % dibandingkan dengan Belanja Pelayanan Publik yang mencapai 68% pada tahun 2005. Jika dibanding antara tahun 2006 dengan tahun 2005, ada kecenderungan Belanja Aparatur menurun menjadi 30 % dan Belanja Pelayanan Publik menjadi meningkat 70%.

Perubahan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP No. 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 diharapkan sudah mulai dilakukan sejak tahun 2003. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap dan dimulai dari perubahan sistem penganggaran termasuk diantaranya mulai

dihapuskannya sistem penganggaran yang lama yang membedakan belanja dengan pendekatan belanja rutin dan belanja pembangunan.

### **4.3 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah**

#### **4.3.1 Analisis Kinerja PAD**

##### **4.3.1.1 Analisis Elastisitas**

Dari analisis elastisitas PAD terhadap PDRB, diketahui bahwa ada 10 provinsi (30%) yang mempunyai nilai elastisitas  $\geq 1$  yaitu Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara dan Banten. Nilai elastisitas yang lebih dari 1 mengandung arti bahwa setiap perubahan PDRB di 10 provinsi tersebut sensitif terhadap perubahan/peningkatan PAD sehingga perubahan PDRB sangat mempengaruhi tingkat PAD daerah – daerah dimaksud. Oleh karena itu dalam kaitan penentuan kebijakan PAD untuk daerah – daerah tersebut tentunya haruslah lebih mempertimbangkan tingkat pertumbuhan perekonomian.

Sementara di 23 provinsi lain (70%), perubahan PDRB-nya tidak cukup mempengaruhi peningkatan PAD. Ini ditunjukkan dengan tingkat elastisitas untuk daerah – daerah tersebut  $< 1$ . Untuk daerah – daerah di Jawa misalnya selain DKI Jakarta tingkat elastisitasnya  $< 1$ . Bagi daerah dengan elastisitas  $< 1$  patut diduga nilai tambah PDRB-nya lebih banyak keluar dari daerah tempat kegiatan perekonomian tersebut diselenggarakan.

Tingkat elastisitas PAD tidak terkait dengan tingkat kekayaan alam suatu daerah yang terlihat pada kecilnya elastisitas PAD terhadap PDRB untuk daerah – daerah kaya sumber daya alam. Ini menguatkan dugaan bahwa untuk daerah – daerah yang kaya akan sumber daya alam pertumbuhan perekonomiannya tidak mempengaruhi tingkat PAD karena pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh kekayaan alam daerah – daerah tersebut tidak digunakan oleh daerah – daerah dimaksud untuk meningkatkan tarif – tarif pajak daerah yang berakibat pada kenaikan PAD.

#### 4.3.1.2 Analisis Pertumbuhan (*Growth*)

Perkembangan suatu keuangan daerah sangat ditentukan oleh tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah dari masing – masing propinsi dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Rata-rata nasional pertumbuhan PAD provinsi dari tahun 2005 ke tahun 2006 adalah 4,75%. Pertumbuhan PAD tersebut masih jauh dari pertumbuhan PDRB secara nasional 2005 – 2006 yang mencapai 16%. Dari 33 propinsi, terdapat 21 propinsi yang pertumbuhan PAD-nya *positip* (70%). Pertumbuhan PAD cukup besar terjadi di Propinsi Sulawesi Barat mencapai 46 % disusul Irian Jaya Barat sebesar 45 % dan Kepulauan Riau mencapai 14%. Propinsi Irian Jaya Barat dan Sulawesi Barat mencapai pertumbuhan yang signifikan pada tahun berkenaan karena kedua propinsi tersebut merupakan propinsi baru dibentuk sehingga perlu banyak melakukan pembangunan guna memenuhi keperluan status pemerintahan yang baru. Meski demikian pada tahun berikutnya untuk daerah – daerah tersebut akan mengalami perlambatan. Hal ini terlihat pada propinsi yang lebih dulu dibentuk misalnya Propinsi Bangka Belitung justru mengalami pertumbuhan minus 7%.

Beberapa propinsi yang pertumbuhan PAD-nya di atas 20 % meliputi Sulawesi Barat, Irian Jaya Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan Maluku. Sedangkan untuk daerah – daerah yang lebih maju tingkat pertumbuhan PAD-nya tidak terlalu signifikan. Bahkan Propinsi Jawa Barat untuk periode 2005 – 2006 mengalami penurunan pertumbuhan PAD sebesar minus 5%. Propinsi yang paling besar mengalami penurunan tingkat pertumbuhan PAD-nya adalah Propinsi Papua yang mencapai minus 20%.

Yang menarik dari hasil pengolahan data pertumbuhan PAD adalah daerah yang memiliki tingkat elastisitas PAD terhadap PDRB lebih dari 1 secara otomatis memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Daerah – daerah tersebut meliputi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara dan Banten. Secara

rata-rata daerah – daerah tersebut memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 24% jauh di atas rata – rata nasional yang hanya mencapai 4,75%

Pertumbuhan PAD untuk daerah – daerah yang relatif maju seperti Jakarta tidak cukup signifikan. Hal ini patut diduga bahwa daerah – daerah tersebut melakukan kebijakan pengurangan tarif pajak daerah atau pengurangan jenis pajak yang dikenakan sebagai komponen PAD. Hal ini mengingat bahwa untuk daerah – daerah tersebut kecil kemungkinan volume perekonomian mengalami penurunan. Meskipun pajak – pajak daerah dapat dikurangi guna mendukung daya saing daerah namun PAD tetap bisa ditingkatkan dengan menggenjot kontribusi perusahaan daerah yang selama ini cenderung merugi.

Pertumbuhan PAD tidak terkait dengan kekayaan sumber daya alam suatu daerah karena kekayaan sumber daya alam tidak dijadikan sebagai salah satu komponen dalam perhitungan PAD. Hal ini disebabkan pajak – pajak terkait pengelolaan kekayaan sumber daya alam dikenakan oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah akan mendapatkan bagiannya sesuai formula bagi hasil sumber daya alam.

#### 4.3.1.3 Peran (*Share*)

Kemampuan daerah membiayai belanja daerah dapat dilihat dari rasio antara PAD dengan APBD. Secara umum semua provinsi belum mampu untuk membiayai seluruh kebutuhan belanja daerahnya dari PAD. Rata-rata nasional rasio PAD terhadap APBD dalam dua tahun terakhir (2005-2006) adalah 41%. Tiga besar propinsi yang tingkat prosentase pembiayaan belanja APBD dari PAD (*share*) cukup besar yaitu Jawa Timur (70%), Jawa Barat (69%), Jawa Tengah (72%), Banten 63%. Sedangkan DKI Jakarta tingkat *share* PAD terhadap belanja APBD hanya sebesar 48% dan propinsi di pulau Jawa lainnya yaitu DI Yogyakarta tingkat *share* PAD terhadap belanja APBD hanya 44% sedikit diatas rata-rata nasional.

Tingginya tingkat *share* untuk daerah – daerah dimaksud menunjukkan bahwa peran PAD dalam membiayai APBD untuk daerah – daerah tersebut cukup signifikan. Yang menarik bahwa untuk daerah – daerah yang memiliki tingkat *share* tinggi bukan merupakan propinsi – propinsi yang tingkat elastisitas dan *growth*-nya tinggi. Daerah – daerah di Pulau Jawa yang tingkat elastisitas dan *growth*-nya tidak terlalu tinggi namun tingkat *share* (rasio PAD dalam membiayai APBD) sangat tinggi. Tingginya tingkat *share* PAD pada propinsi – propinsi di Pulau Jawa meski tingkat elastisitas dan *growth*-nya rendah, sementara itu beberapa daerah di luar Pulau Jawa memiliki tingkat elastisitas dan *growth* tinggi namun tingkat *share* yang merendahkan diduga disebabkan oleh dua hal yaitu tingginya kesenjangan pembangunan antara propinsi – propinsi di Jawa dan Luar Jawa dan indikasi bahwa propinsi di luar Pulau Jawa relatif lebih kecil kontribusi PAD-nya dalam APBD karena APBD daerah dimaksud lebih besar ditopang oleh bagi hasil pengolahan sumber daya alam.

Tingginya tingkat kontribusi PAD pada APBD mengharuskan kehati-hatian yang tinggi daerah – daerah tersebut dalam menentukan kebijakan terkait pajak dan retribusi daerah. Hal ini sangat terkait dengan kebijakan kenaikan tarif pajak/retribusi daerah dengan harapan kenaikan PAD atau penurunan tarif dengan harapan kenaikan PAD dari sisi bertambahnya volume karena bertambahnya cakupan pajak/retribusi seiring meningkatnya volume perekonomian.

Bagi daerah – daerah di luar Pulau Jawa khususnya daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah tidak terlalu tergantung dengan PAD dalam pembiayaan APBD-nya. Meski demikian semakin berkurangnya sumber daya alam di daerah – daerah tersebut perlu diwaspadai oleh daerah dengan memperbaiki kebijakan pembiayaan atas dana bagi hasil daerah sehingga di masa mendatang dapat diandalkan sebagai bagian dari penerimaan daerah lain lain.

Propinsi – propinsi yang memiliki tingkat elastisitas dan *growth* yang tinggi tidak serta merta mengakibatkan tingkat *share* PAD terhadap APBD di daerah tersebut signifikan. Hal ini terlihat untuk 10 propinsi yang memiliki tingkat elastisitas dan pertumbuhan cukup tinggi namun tingkat *share*-nya berada di bawah rata-rata

nasional. Propinsi-propinsi tersebut meliputi Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara.

Untuk propinsi di luar pulau Jawa yang mempunyai tingkat *share* cukup tinggi adalah Sumatera Utara (60%), Bali (58%). Sedangkan untuk tiga propinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun dimaksud ternyata hanya sedikit tingkat *share* PAD terhadap belanja APBD meliputi Sulawesi Barat (10%), Irian Jaya Barat (3%) dan Propinsi Riau 27%.

Secara umum berikut ditampilkan tingkat Peta Kinerja PAD berdasarkan tingkat *elastisitas*, *growth* dan *share* sebagai gambaran umum kemampuan keuangan daerah. Peta Kinerja PAD melalui Metode Indeks ditampilkan pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tingkat share growth dan elastisitas**  
**Pendapatan Asli Daerah Menurut Per Propinsi**

No	Nama Daerah	Growth	Share	Elastisitas
1	Nanggroe Aceh Darussalam	-0.27	0.09	-0.42%
2	Sumatera Utara	0.47%	60.30%	0.03%
3	Sumatera Barat	3.19%	41.78%	0.17%
4	Riau	14.03%	27.52%	0.38%
5	Jambi	-2.40%	29.10%	-0.23%
6	Sumatera Selatan	4.81%	39.19%	0.20%
7	Bengkulu	-5.38%	28.94%	-0.52%
8	Lampung	-6.81%	33.73%	-0.48%
9	Bangka Belitung	-6.89%	34.18%	-0.78%
10	Kepulauan Riau	45.15%	27.06%	1.40%
11	DKI Jakarta	13.20%	48.37%	1.48%
12	Jawa Barat	-5.68%	69.06%	-0.24%
13	Jawa Tengah	2.37%	72.67%	0.12%
14	DI Yogya	7.92%	44.79%	0.80%
15	Jawa Timur	0.95%	70.59%	0.05%
16	Kalimantan Barat	14.10%	33.08%	1.08%
17	Kalimantan Tengah	12.00%	21.90%	0.53%
18	Kalimantan Selatan	9.81%	51.81%	1.83%
19	Kalimantan Timur	-9.40%	19.56%	-0.46%
20	Sulawesi Utara	5.30%	30.83%	0.38%

**Tabel 4.1**  
**Tingkat *share*, *growth* dan *elastisitas* Pendapatan Asli Daerah**  
**Menurut Per Propinsi (Lanjutan)**

No	Nama Daerah	Growth	Share	Elastisitas
21	Sulawesi Tengah	2.70%		
22	Sulawesi Selatan	2.73%	50.88%	0.20%
23	Sulawesi Tenggara	35.22%	21.72%	1.55%
24	Sulawesi Barat	46.51%	10.29%	1.36%
25	Bali	-3.05%	58.37%	-0.66%
26	Nusa Tenggara Barat	27.11%	22.46%	2.01%
27	Nusa Tenggara Timur	7.49%	31.68%	0.51%
28	Maluku	24.11%	7.27%	3.66%
29	Papua	-20.42%	16.33%	0.18%
30	Iriabab	45.45%	5.37%	-3.93%
31	Maluku Utara	18.82%	3.66%	2.15%
32	Banten	15.95%	63.56%	1.29%
33	Gorontalo	1.36%	9.92%	0.11%
rata-rata nasional		8.31%	33.92%	0.42%

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

#### 4.4.1.4 Peta Kinerja PAD Berdasarkan Metode Kuadran

Dari profil kemampuan keuangan dengan metode kuadran diketahui bahwa secara umum jumlah provinsi pada masing-masing kuadran relatif merata. Untuk kuadran III (kurang ideal) meliputi 8 propinsi (24%) yaitu propinsi yang memiliki share PAD terhadap APBD tinggi namun tingkat pertumbuhan PAD-nya rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Sedangkan propinsi yang masuk dalam kuadran I (kondisi ideal) yaitu propinsi-propinsi yang pertumbuhan PAD-nya tinggi dan tingkat *share* PAD terhadap APBD cukup tinggi hanya 4 propinsi (12%) yaitu Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Banten. Keempat daerah tersebut baik tingkat *share* maupun *growth*-nya di atas rata-rata nasional. Kecilnya jumlah propinsi yang berada pada kuadran ideal tersebut menunjukkan tingkat kesenjangan yang cukup tinggi antar daerah terkait tingkat pertumbuhan PAD maupun tingkat *share* daerah propinsi di Indonesia.

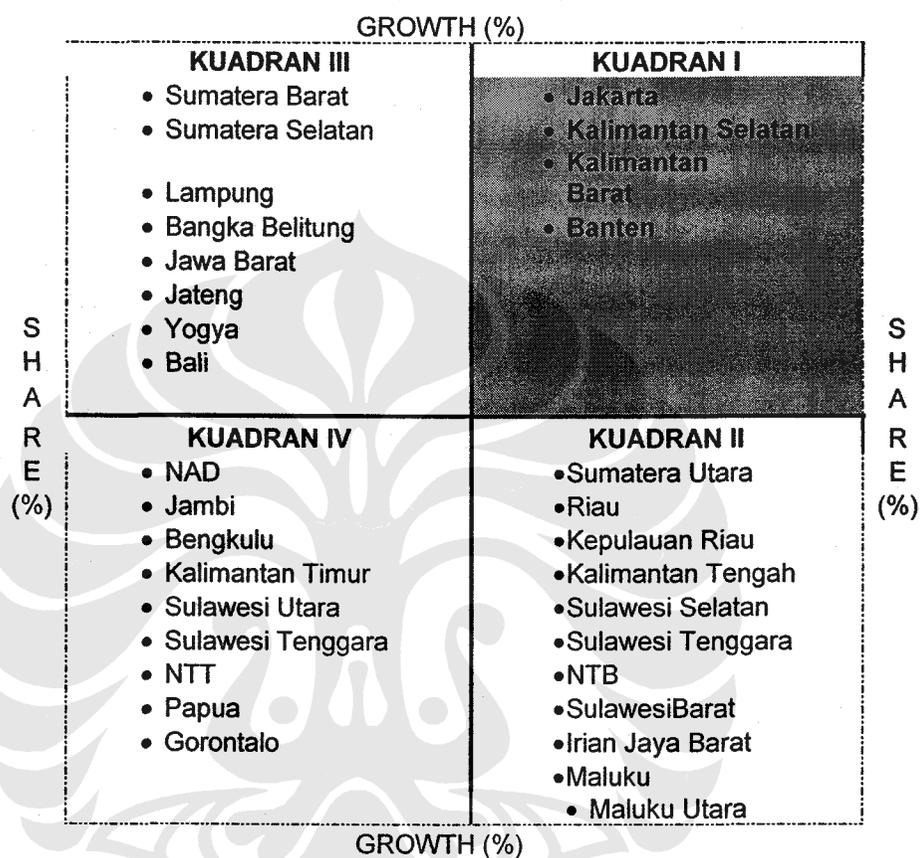
Kondisi yang paling banyak dialami oleh propinsi di Indonesia adalah tingkat *growth*-nya tinggi namun tingkat *share* PAD terhadap APBD rendah. Propinsi yang berada pada kondisi mencapai 35% yaitu 11 propinsi (yang berada pada kuadran II). Sedangkan daerah yang berada pada IV adalah 9 propinsi untuk kuadran yaitu propinsi yang tingkat *growth* maupun *share*-nya rendah dibandingkan rata-rata nasional.

Yang menarik adalah bahwa Jakarta dan Banten termasuk dalam empat propinsi yang masuk dalam kondisi ideal sementara kedua propinsi tersebut tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang memadai dibandingkan dengan propinsi-propinsi yang lain yang banyak mengandalkan kekayaan sumber daya alam. Hampir semua propinsi yang masuk dalam kuadran III adalah propinsi wilayah KBI (Kawasan Barat Indonesia) yaitu kelompok propinsi yang tingkat *share* PAD-nya tinggi namun pertumbuhan PAD-nya masih dibawah rata-rata nasional. Ini menunjukkan bahwa tingkat *growth* PAD yang kecil dari daerah – daerah Kawasan Barat Indonesia tidak menghambat tingkat rasio PAD guna menopang APBD. Hal ini patut diduga bahwa meskipun tingkat pertumbuhan PAD untuk daerah – daerah tersebut tidak signifikan terutama untuk kemungkinan kenaikan tarif pajak / retribusi daerah sebagai komponen PAD, namun daerah - daerah tersebut telah cukup mapan dengan tingkat volume perekonomian yang cukup signifikan membantu pendapatan asli daerah.

Sedangkan hampir semua propinsi yang masuk dalam kuadran IV kecuali NAD dan Jambi adalah propinsi Kawasan Timur Indonesia yang notabene sangat mengandalkan kekayaan sumber daya alamnya sebagai faktor pendorong penerimaan pendapatan asli daerah. Sedangkan Papua, Kalimantan Timur dan Aceh yang notabene memiliki sumberdaya alam yang melimpah namun tidak memiliki pertumbuhan PAD yang memadai dan tingkat *share* PAD terhadap belanja APBD juga kecil. Ini semakin menguatkan bahwa daerah – daerah tersebut APBD-nya tidak cukup signifikan dibiayai oleh PAD namun porsi yang lebih tinggi dari APBD disumbangkan dari pembagian atas kekayaan sumber daya alam daerah – daerah dimaksud.

Berikut Gambar 4.4 yang menunjukkan peta kemampuan keuangan propinsi dengan metode kuadran sebagai berikut :

**Gambar 4.4**  
**Peta Kemampuan Keuangan Provinsi**



Berdasarkan Metode Kuadran (titik tengah rata-rata nasional)

Dengan demikian ada harapan bahwa kemandirian daerah yang diukur melalui PAD dapat dikembangkan melalui potensi-potensi lain diluar dari sekedar bergantung kepada Sumber daya alam. Disamping kemampuan pengelolaan PAD dimaksud juga akan membantu daerah dalam melihat kemampuannya untuk mengelola pinjaman apabila daerah tersebut melakukan pinjaman .

#### 4.4.1.5 Peta Kinerja PAD Berdasarkan Metode Indeks

Disamping kemampuan kinerja PAD daerah diukur dengan angka share dan *growth* juga perlu dilihat dari tingkat elastisitasnya yaitu tingkat perubahan PAD karena

perubahan PDRB di daerah tersebut. Ketiga alat ukur tersebut (elastisitas, share dan growth) digabungkan menjadi indek kemampuan keuangan. Dengan metode Indek Kemampuan Keuangan, diketahui sebelas propinsi provinsi yang mempunyai *IKK Tinggi*, yaitu Maluku, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Di Yogya, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Banten, Riau, Bangka Belitung dan Sulawesi Utara. Berikutnya terdapat 11 provinsi yang mempunyai *IKK Sedang* yaitu Jawa Timur, Maluku Utara, Kalimantan Timur, Iriabar, Lampung, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan dan Jawa Barat. Dan 11 provinsi mempunyai *IKK rendah* adalah: Jawa Tengah, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Papua, Bengkulu, Bali, Nusa Tenggara Timur, Jambi, Nanggroe Aceh Darussalam.

Berdasarkan analisis indeks dengan proses pemeringkatan tersebut juga terlihat bahwa propinsi – propinsi di Pulau Jawa tidak berada pada posisi ideal (tinggi) meski dalam analisis share propinsi di pulau Jawa cukup baik. Dalam indek gabungan ini terlihat bahwa Propinsi DI Yogya dan DKI Jakarta hanya berada pada posisi kelima dan ketujuh. Sedangkan Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah hanya menduduki peringkat ke-12, 22 dan 23.

Berikut Tabel 4.2 menunjukkan peta kemampuan keuangan propinsi dengan metode indek berdasarkan analisis *growth*, *share* dan elastisitas PAD :

**Tabel 4.2**  
**Peta Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi**

No	Nama Daerah	Indeks Growth	Indeks Share	Indeks Elastisitas	Indeks Kemam puan	Peta Kemampuan
1	Maluku	0,6932	0,8207	1,0000	0,8380	TINGGI
2	Sumatera Utara	0,9813	0,5524	0,7021	0,7453	
3	Sulawesi Tengah	0,4716	1,0000	0,6228	0,6981	
4	Sumatera Selatan	0,5275	0,9476	0,5879	0,6877	
5	DI Yogya	0,4357	0,9698	0,5681	0,6579	
6	Kepulauan Riau	0,6208	0,5148	0,8014	0,6456	
7	DKI Jakarta	0,8453	0,3457	0,7224	0,6378	

**Tabel 4.2**  
**Peta Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi (Lanjutan)**

No	Nama Daerah	Indeks Growth	Indeks Share	Indeks Elastisitas	Indeks Kemampuan	Peta Kemampuan
8	Banten	0,7343	0,3686	0,7822	0,6284	
9	Riau	1,0000	0,0792	0,6970	0,5921	
10	Bangka Belitung	0,5552	0,6479	0,5683	0,5905	
11	Sulawesi Utara	0,4974	0,4423	0,7582	0,5660	
12	Jawa Timur	0,5439	0,4357	0,7127	0,5641	
13	Maluku Utara	0,4656	0,5960	0,5844	0,5487	
14	Kalimantan Timur	0,4067	0,6976	0,5402	0,5482	
15	Irjabar	0,5815	0,3663	0,6874	0,5451	
16	Lampung	0,3302	0,7928	0,4871	0,5367	
17	Sulawesi Barat	0,3817	0,6842	0,5318	0,5326	
18	Sumatera Barat	0,5562	0,3390	0,6604	0,5185	
19	Nusa Tenggara Barat	0,0835	0,8680	0,5410	0,4975	
20	Sulawesi Tenggara	0,9854	0,4264	0,0000	0,4706	
21	Kalimantan Selatan	0,4001	0,3937	0,5403	0,4447	
22	Jawa Barat	0,4290	0,2643	0,5436	0,4123	<b>RENDAH</b>
23	Jawa Tengah	0,3956	0,2985	0,5340	0,4094	
24	Gorontalo	0,2853	0,4060	0,4856	0,3923	
25	Kalimantan Tengah	0,4004	0,2304	0,5442	0,3917	
26	Sulawesi Selatan	0,3762	0,2616	0,5241	0,3873	
27	Kalimantan Barat	0,3213	0,2724	0,4310	0,3416	
28	Papua	0,3695	0,0961	0,5218	0,3291	
29	Bengkulu	0,2894	0,1836	0,4490	0,3073	
30	Bali	0,2698	0,0522	0,4547	0,2589	
31	Nusa Tenggara Timur	0,2344	0,0247	0,4569	0,2387	
32	Jambi	0,2688	0,0000	0,4152	0,2280	
33	Nanggroe Aceh Darussalam	0,0000	0,0907	0,4625	0,1844	

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Yang menarik dari hasil peta diatas bahwa dengan memasukkan unsur elastisitas PAD terhadap PDRB provinsi angka IKK (Indek Kemampuan Keuangan) Kalimantan Selatan hanya termasuk kualifikasi sedang, bahkan angka IKK Kalimantan Barat termasuk dalam kelompok rendah. Padahal sebagaimana terlihat dalam peta kemampuan keuangan dengan metode kuadran yang hanya

memperhitungkan komponen share dan growth kedua propinsi tersebut masuk dalam kelompok propinsi yang ideal yaitu tingkat share dan growthnya tinggi.

### **4.3.2 Analisis Kemampuan Pinjam Pemerintah Propinsi**

#### **4.3.2.1 Analisis DSCR**

Analisis DSCR digunakan untuk menilai tingkat kemampuan daerah untuk melakukan pembayaran cicilan atas pinjaman yang akan dilakukan. Berdasarkan data tahun 2005/2006 sebagaimana terlihat pada data terlampir terlihat bahwa seluruh propinsi di Indonesia memiliki kesempatan (masih dibenarkan) sesuai PP 54 Tahun 2005 untuk melakukan pinjaman. Hal ini terlihat bahwa DSCR dari seluruh propinsi yang ada menunjukkan lebih besar atau sama dengan 2,5 sehingga masih dalam batas kewajaran untuk melakukan pinjaman.

Daerah yang paling kecil DSCR-nya yaitu Sumatera Barat, Papua dan Jawa Barat. Sedangkan tiga propinsi yang memiliki DSCR paling tinggi adalah Riau, Kalimantan Timur dan Nangroe Aceh Darussalam ini disebabkan oleh besarnya PAD, pendapatan bagian daerah dan dana alokasi umum daerah – daerah tersebut sedangkan belanja wajibnya sebagai faktor pengurang dalam perhitungan DSCR cukup rendah. Dengan demikian seluruh propinsi di Indonesia dapat melakukan pinjaman. Yang menarik dari hasil pengolahan bahwa daerah kaya belum tentu memiliki tingkat kemampuan membayar yang tinggi hal ini patut diduga bahwa daerah tersebut telah dibebani oleh pembayaran cicilan hutang yang telah dilakukan. Hal ini terjadi pada propinsi Papua sehingga meskipun propinsi dimaksud termasuk propinsi yang kaya namun pada tahun 2006 memiliki DSCR relatif kecil dibandingkan daerah lain.

#### 4.3.2.2 Analisis Besaran Maksimal Pinjaman Jangka Panjang

Analisis ini digunakan untuk menghitung besaran maksimal pinjaman yang dapat dilakukan oleh pemerintah propinsi. Perhitungan dilakukan merujuk pada ketentuan PP No. 54 Tahun 2005 yaitu batasan maksimal pinjaman daerah adalah 75% dari besaran penerimaan umum dari suatu daerah. Sedangkan besaran penerimaan umum adalah Jumlah penerimaan daerah (PD) yang dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, Dana Pinjaman dan Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan bahwa untuk tahun 2006, 11 propinsi yang termasuk dalam kategori tingkat batas kemampuan pinjamnya tinggi adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Maluku, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Banten, Sulawesi Tengah, Jambi, Jawa Timur dan Sumatera Utara. Sedangkan 11 propinsi yang masuk kategori batas kemampuan pinjaman sedang adalah Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Irjabar, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Lampung dan Kalimantan Tengah. Sebelas daerah yang masuk kategori batas kemampuan pinjamnya rendah adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Riau, Sumatera Selatan, Gorontalo, Papua dan Bali.

Yang menarik dari hasil analisis ini adalah bahwa masing – masing bahwa propinsi dari Jawa termasuk dalam kategori memiliki batas pinjaman yang tinggi yaitu DKI Jakarta, Jateng, Jabar dan Jatim. Keempat daerah tersebut masing – masing memiliki batasan maksimal pinjaman sebagai berikut DKI Jakarta sebesar 7,2 triliun, Jawa Tengah sebesar 2 triliun, Jawa Barat sebesar 2,8 triliun dan Jawa Timur sebesar 2,6 triliun. Daerah luar pulau Jawa yang memiliki batas pinjaman tinggi adalah Sumatra Utara sebesar 1,2 triliun dan Riau sebesar 1,4 triliun.

Berikut Tabel 4.3 yang menunjukkan peta kemampuan meminjam daerah (penawaran) sukuk daerah berdasar kinerja PAD dan kemampuan pinjam merujuk PP 54 Tahun 2005 :

**Tabel.4.3**  
**Peta Penawaran Meminjam**

<b>No</b>	<b>Nama daerah</b>	<b>Indeks Pinjam</b>	<b>Indeks kinerja PAD</b>	<b>Indeks Kemampuan</b>	<b>Peta Kemampuan</b>
1	DKI Jakarta	1,0000	0,4123	0,7061	<b>TINGGI</b>
2	Jawa Tengah	0,2712	0,6579	0,4645	
3	Maluku	0,0280	0,8380	0,4330	
4	Jawa Barat	0,3909	0,4094	0,4001	
5	Kalimantan Timur	0,0234	0,7453	0,3843	
6	Banten	0,1284	0,6284	0,3784	
7	Sulawesi Tengah	0,0374	0,6981	0,3678	
8	Jambi	0,0295	0,6877	0,3586	
9	Jawa Timur	0,3595	0,3416	0,3506	
10	Sumatera Utara	0,1615	0,5185	0,3400	
11	Bangka Belitung	0,0218	0,6456	0,3337	<b>SEDANG</b>
12	Sumatera Barat	0,0553	0,5921	0,3237	
13	Kepulauan Riau	0,0063	0,6378	0,3221	
14	Lampung	0,0395	0,5905	0,3150	
15	Kalimantan Selatan	0,0685	0,5482	0,3083	
16	DI Yogya	0,0503	0,5641	0,3072	
17	Sulawesi Utara	0,0343	0,5660	0,3001	
18	Maluku Utara	0,0183	0,5487	0,2835	
19	Bengkulu	0,0280	0,5367	0,2824	
20	Irjabar	0,0035	0,5451	0,2743	
21	Nusa Tenggara Barat	0,0383	0,4975	0,2679	
22	Sulawesi Barat	0,0000	0,5326	0,2663	<b>RENDAH</b>
23	Sulawesi Tenggara	0,0262	0,4706	0,2484	
24	Sulawesi Selatan	0,1067	0,3873	0,2470	
25	Kalimantan Tengah	0,0424	0,4447	0,2435	
26	Kalimantan Barat	0,0576	0,3917	0,2246	
27	Riau	0,1925	0,2280	0,2102	
28	Sumatera Selatan	0,1043	0,3073	0,2058	
29	Gorontalo	0,0138	0,3923	0,2030	
30	Papua	0,0678	0,3291	0,1985	
31	Bali	0,0690	0,2589	0,1639	
32	Nusa Tenggara Timur	0,0348	0,2387	0,1367	
33	Nanggroe Aceh Darussalam	0,0725	0,1844	0,1285	

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Selanjutnya dilakukan analisis yang menunjukkan aspek penawaran sukuk dengan menggabungkan kinerja PAD dan indeks meminjam sesuai PP 54 Tahun 2005. Dengan analisis ini diharapkan dapat ditunjukkan tingkat kemampuan meminjam daerah sebagai faktor penawaran dalam penelitian peta kemampuan dan permintaan penerbitan sukuk oleh pemerintah propinsi. Dalam analisis ini menggabungkan antara indeks kemampuan keuangan yang meliputi analisis elastisitas PAD, *share* PAD dan *growth* PAD dengan indeks batas kemampuan meminjam merujuk ketentuan pada PP 54 tahun 2005.

Berdasarkan hasil pengolahan dapat diambil kesimpulan propinsi yang masuk kategori memiliki kemampuan penawaran penerbitan sukuk tinggi dengan menggunakan parameter tersebut meliputi Jawa Tengah DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Timur Kalimantan Barat DI Yogya Sumatera Barat Jambi Banten Maluku Kalimantan Timur. Sebelas daerah dalam kategori penawarannya sedang yaitu Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Lampung, dan Kalimantan Tengah.

Sedangkan sebelas daerah dengan kemampuan penawaran peminjaman rendah yaitu Sulawesi Tenggara, Riau Maluku Utara Irijabar Sulawesi Barat Sumatera Selatan Gorontalo Nanggroe Aceh Darussalam Papua Nusa Tenggara Timur. Dari analisis ini terlihat bahwa seluruh propinsi Jawa berada pada posisi teratas untuk kemampuan permintaan hutang berdasarkan kinerja PAD dan kemampuan berhutang. Hal ini disebabkan untuk propinsi – propinsi dimaksud memiliki besaran dana likuid yang berlimpah di daerah daerah lain. Di samping itu daerah – daerah di pulau Jawa memiliki jumlah keluarga sejahtera yang lebih banyak dibandingkan daerah di luar pulau Jawa yang relatif mengalami ketertinggalan dalam capain kesejahteraan masyarakat.

#### 4.4 Analisis Permintaan Sukuk Propinsi

Terdapat tiga elemen yang digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi permintaan atas sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah propinsi yaitu komposisi keluarga sejahtera, jumlah penduduk muslim dan dana likuid yang tersedia di daerah dimaksud. Secara umum kawasan barat Indonesia lebih memiliki kemampuan permintaan yang lebih dibandingkan kawasan daerah timur hal ini mengingat tiga elemen (jumlah penduduk muslim, jumlah dana likuid dan jumlah keluarga sejahtera) dalam pengukuran relatif lebih tinggi pada daerah – daerah di Kawasan Barat Indonesia.

Berikut Tabel 4.4 menunjukkan peta permintaan penerbitan sukuk untuk masing-masing daerah :

**Tabel 4.4**

**Peta Permintaan atas Penerbitan Sukuk Oleh Pemerintah Propinsi**

No	Nama Daerah	Indeks Penduduk Muslim	Indeks Keluarga Sejahtera	Indeks Dana Likuid	Indek Permintaan	Peta Permintaan
1	Jawa Barat	1,0000	0,6514	0,6262	0,5505	
2	DKI Jakarta	0,1965	1,0000	1,0000	0,3988	
3	Jawa Timur	0,9269	0,2408	0,2590	0,3892	
4	DI Yogya	0,0722	0,8508	0,8096	0,3077	
5	Jawa Tengah	0,8127	0,0965	0,1315	0,3030	
6	Sumatera Utara	0,2121	0,4087	0,4669	0,2069	<b>TINGGI</b>
7	Kepulauan Riau	0,0193	0,4580	0,6578	0,1591	
8	Riau	0,1026	0,3293	0,3958	0,1440	
9	Sulawesi Selatan	0,1896	0,1632	0,2100	0,1176	
10	Sumatera Selatan	0,1660	0,1660	0,1764	0,1107	
11	NTB	0,0984	0,2125	0,1244	0,1036	
12	Banten	0,2196	0,0693	0,0636	0,0963	
13	Lampung	0,1702	0,1075	0,1038	0,0926	
14	N A D	0,1014	0,1361	0,3597	0,0792	
15	Sumatera Barat	0,1085	0,1270	0,1319	0,0785	
16	Kalimantan Barat	0,0531	0,1745	0,1945	0,0759	
17	Kalimantan Timur	0,0544	0,1035	0,0890	0,0526	<b>SEDANG</b>
18	Sulawesi Tengah	0,0388	0,1077	0,1599	0,0488	

Tabel 4.4

## Peta Permintaan atas Penerbitan Sukuk Oleh Pemerintah Propinsi (Lanjutan)

No	Nama Daerah	Indeks Penduduk Muslim	Indeks Keluarga Sejahtera	Indeks Dana Likuid	Indek Permintaan	Peta Permintaan
19	Kalimantan Selatan	0,0745	0,0647	0,0769	0,0464	
20	Jambi	0,0572	0,0785	0,1521	0,0452	
21	Sulawesi Tenggara	0,0399	0,0871	0,1025	0,0423	
22	Sulawesi Utara	0,0064	0,0961	0,1057	0,0342	
23	Kal Tengah	0,0277	0,0722	0,0882	0,0333	
24	Bali	0,0007	0,0622	0,0668	0,0210	
25	Gorontalo	0,0142	0,0464	0,0017	0,0202	
26	Bangka Belitung	0,0141	0,0302	0,0238	0,0148	
27	Bengkulu	0,0305	0,0090	0,0152	0,0132	
28	Nusa Tenggara Timur	0,0000	0,0372	0,0429	0,0124	<b>RENDAH</b>
29	Sulawesi Barat	0,0337	0,0000	0,0000	0,0112	
30	Papua	0,0060	0,0118	0,1041	0,0059	
31	Maluku	0,0054	0,0060	0,1143	0,0038	
32	Maluku Utara	0,0078	0,0033	0,0839	0,0037	
33	Iriabab	0,0080	0,0018	0,0940	0,0033	

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Ditjen Perimbangan Keuangan, Depkeu (diolah)

Berdasarkan dana likuid yang ada di seluruh propinsi terdapat dana menganggur sebesar 65 triliun akan tetapi dana tersebut yang dapat diinvestasikan ke dalam instrumen sukuk diperkirakan 20% sehingga seluruh propinsi potensi dana yang dapat dihimpun sekitar 13 triliun. Yang paling besar adalah DKI Jakarta sebesar 1,7 triliun, Jawa Barat 1,1 triliun, Kepulauan Riau 1,1 triliun, DI Yogya sebesar 1,4 triliun.

#### 4.5 Analisis Kemampuan Penawaran dan Permintaan Sukuk

Selanjutnya berdasarkan indeks permintaan dan penawaran dapat digabungkan sehingga akan dapat dilihat pada Tabel 4.5 yang menunjukkan secara umum peta kemampuan dan permintaan penerbitan sukuk.

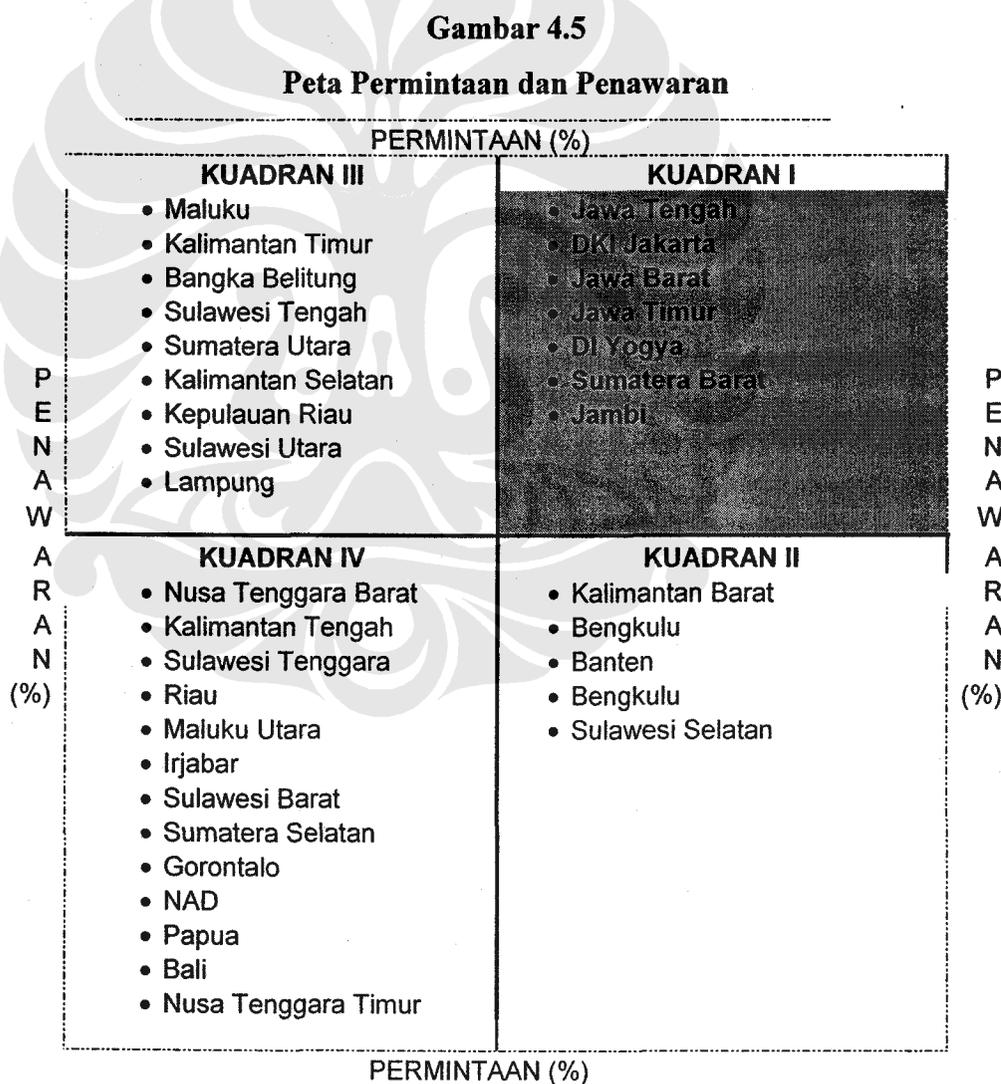
**Tabel. 4.5**  
**Peta penawaran dan permintaan**  
**atas penerbitan sukuk oleh pemerintah propinsi**

No	Nama Daerah	Indeks penawaran	Indeks permintaan	Indeks penawaran dan permintaan	Peta penawaran dan permintaan
1	Jawa Tengah	0,4645	0,5505	0,5075	TINGGI
2	DKI Jakarta	0,7061	0,1591	0,4326	
3	Jawa Barat	0,4001	0,3988	0,3995	
4	Jawa Timur	0,3506	0,3077	0,3291	
5	Kalimantan Barat	0,2246	0,3892	0,3069	
6	DI Yogya	0,3072	0,3030	0,3051	
7	Sumatera Barat	0,3237	0,2069	0,2653	
8	Jambi	0,3586	0,1440	0,2513	
9	Banten	0,3784	0,0963	0,2373	
10	Maluku	0,4330	0,0038	0,2184	
11	Kalimantan Timur	0,3843	0,0464	0,2154	
12	Bangka Belitung	0,3337	0,0926	0,2132	SEDANG
13	Sulawesi Tengah	0,3678	0,0488	0,2083	
14	Bengkulu	0,2824	0,1107	0,1965	
15	Sumatera Utara	0,3400	0,0526	0,1963	
16	Nusa Tenggara Barat	0,2679	0,1036	0,1858	
17	Sulawesi Selatan	0,2470	0,1176	0,1823	
18	Kalimantan Selatan	0,3083	0,0333	0,1708	
19	Kepulauan Riau	0,3221	0,0148	0,1684	
20	Sulawesi Utara	0,3001	0,0342	0,1671	
21	Lampung	0,3150	0,0132	0,1641	
22	Kalimantan Tengah	0,2435	0,0759	0,1597	
23	Sulawesi Tenggara	0,2484	0,0423	0,1454	RENDAH
24	Riau	0,2102	0,0785	0,1444	
25	Maluku Utara	0,2835	0,0037	0,1436	
26	Irjabar	0,2743	0,0033	0,1388	
27	Sulawesi Barat	0,2663	0,0112	0,1388	
28	Sumatera Selatan	0,2058	0,0452	0,1255	
29	Gorontalo	0,2030	0,0202	0,1116	
30	Nanggroe Aceh Darussalam	0,1285	0,0792	0,1038	
31	Papua	0,1985	0,0059	0,1022	
32	Bali	0,1639	0,0210	0,0925	
33	Nusa Tenggara Timur	0,1367	0,0124	0,0746	

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Ditjen Perimbangan Keuangan, Depkeu (diolah)

Berdasarkan analisis tersebut terlihat bahwa enam daerah yang termasuk memiliki kemampuan penawaran dan permintaan yang tinggi terhadap penerbitan sukuk propinsi adalah propinsi – propinsi dipulau Jawa yaitu enam besar secara urutan adalah Jateng, DKI Jakarta, Jabar, Jatim, Kalimantan Barat dan DI Yogya. Yang menarik dari peta dimaksud adalah bahwa daerah- daerah yang kaya akan sumberdaya alam termasuk dalam potensi kemampuan penawaran dan permintaan sukuk yang rendah sehingga hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa untuk daerah-daerah yang kaya SDA kiranya tidak perlu melakukan pinjaman (menerbitkan sukuk).

Berdasarkan metode kuadran berikut Gambar 4.5 yang menunjukkan peta kemampuan dan permintaan sukuk propinsi :



Pengolahan dengan metode kuadran dilakukan terhadap data yang sama. Pengolahan dilakukan dengan mengelompokkan masing – masing propinsi ke dalam empat kuadran dengan rata – rata nasional sebagai titik penentuan suatu propinsi berada diatas atau di bawah rata nasional baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan.

Berdasarkan metode kuadran tersebut terlihat bahwa hanya 7 dari 11 propinsi yang dikategorikan mempunyai skor tinggi dan berada pada kuadran yang ideal yaitu memiliki penawaran yang di atas rata-rata nasional dan memiliki tingkat permintaan di atas rata- rata nasional . Ketujuh daerah tersebut adalah Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogya, Sumatera Barat dan Jambi. Sedangkan propinsi Banten, Kalimantan Barat, Maluku dan Kalimantan Timur tidak masuk dalam kuadran ideal ini menunjukkan bahwa keempatdaerah tersebutmasih kurang ideal dalam piloting penerbitan sukuk oleh pemerintah propinsi.

Dari analisis tersebut untuk ketujuh daerah tersebut sangat potensial guna penerbitan sukuk. Berdasarkan hasil Susenas 2005 potensi permintaan sukuk untuk masing – masing daerah sebagaimana Tabel 4.6 sebagai berikut :

**Tabel 4.6**  
**Potensi Besaran Permintaan & Batasan Maksimal Pinjam**  
**Sukuk Untuk Daerah Terpilih**

No	Nama Propinsi	Batasan maksimal pinjam (juta rupiah)	20% dana likuid (juta rupiah)	Keterangan
1	Jawa Tengah	2.009.928	253.752	
2	DKI Jakarta	7.231.461	1.774.106	
3	Jawa Barat	2.867.564	1.119.764	
4	Jawa Timur	2.642.844	476.966	
5	DI Yogya	427.431	1.440.871	
6	Sumatera Barat	463.300	254.337	
7	Jambi	277.998	289.780	

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Ditjen Perimbangan Keuangan, Depkeu (diolah)

Sedangkan dari sisi batasan peminjaman merujuk PP 54 Tahun 2005 masing – masing daerah memiliki batasan meminjam daerah yang memiliki batas meminjam cukup tinggi sebesar 7 triliun sedangkan Jawa Tengah dan Jawa Barat masing – masing memiliki batasan sebesar 2 triliun dan 2, 8 triliun dan Jawa Timur sebesar 2,6 triliun. Dengan data potensi dana likuid di masing – masing daerah dibutuhkan usaha yang maksimal untuk menarik dana-dana dimaksud untuk dapat dimobilisasi guna membeli sukuk daerah. Propinsi Jawa Tengah memiliki batasan maksimal pinjaman yang cukup tinggi yaitu 2 triliun dibandingkan potensi dana likuid yang dimiliki daerah tersebut yaitu 1,2 triliun sehingga potensi dana likuid dapat 100% diupayakan untuk dimobilisasi menjadi pinjaman daerah.

Berikut Tabel 4.7 menunjukkan prosentase maksimal pinjam terhadap dana likuid sebagai berikut :

**Tabel 4.7**  
**Prosentase Batasan Maksimal Pinjam terhadap Dana Likuid**  
**Untuk Daerah Terpilih**

No	Nama Propinsi	Batasan maksimal pinjam (juta rupiah)	dana likuid (juta rupiah)	Prosentase
1	Jawa Tengah	2.009.928	1.268.780	158%
2	DKI Jakarta	7.231.461	8.870.530	81%
3	Jawa Barat	2.867.564	5.598.820	51%
4	Jawa Timur	2.642.844	2.384.830	110%
5	DI Yogya	427.431	7.204.355	5%
6	Sumatera Barat	463.300	1.271.685	36%
7	Jambi	277.998	1.448.900	19%

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Ditjen Perimbangan Keuangan, Depkeu (diolah)

Daerah yang memiliki prosentase besar antara batasan maksimal dibandingkan dana likuid menunjukkan bahwa dana likuid yang ada sangat besar untuk dapat diserap oleh penawaran sukuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Daerah yang memiliki kemampuan tinggi untuk menyerap potensi dana liquid yang ada adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur dimana kemampuan meminjamnya mencapai 158% dan 110 % dari dana likuid yang tersedia.

Peningkatan penyerapan atas penawaran sukuk dapat dilakukan dengan meningkatkan tingkat pemahaman masyarakat yang lebih memadai. Ada beberapa hal lain yang dapat dilakukan agar porsi permintaan sukuk di daerah makin besar yaitu a) perbaikan kerangka regulasi dengan jaminan pemerintah pusat atas sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan terhadap kegagalan bayar oleh pemerintah daerah akan diperhitungkan dengan alokasi dana perimbangan propinsi di maksud, b) kebijakan pembatasan agar penerbitan sukuk daerah hanya dibatasi untuk pembiayaan proyek daerah sehingga penerimaan yang berasal dari penjualan sukuk dimaksud benar – benar bermanfaat bagi pergerakan sektor riil.

Di samping itu keberadaan dana – dana internasional saat ini juga sangat signifikan yang siap untuk membeli penerbitan sukuk daerah sepanjang ada regulasi berupa jaminan pemerintah pusat atas kegagalan bayar return sukuk oleh pemerintah daerah.